



Analisis Teori Klasik Sosiologi Pendidikan: Perspektif Fungsionalisme, Konflik, dan Interaksionisme

Munziah^{1*}, Niken Froidasari², Muhammad Yasin³

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan Islam, Tarbiyah, STAI Sangatta, Indonesia

*Email Korespondensi: munziahmunziah6@gmail.com

Abstrak

Pendidikan bukan sekadar ruang transfer ilmu, tetapi arena sosial yang membentuk nilai, norma, dan identitas kolektif. Kajian ini menggunakan perspektif sosiologi pendidikan untuk membaca dinamika pendidikan Indonesia melalui tiga teori utama: fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme simbolik. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap karya akademik tahun 2005–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa fungsionalisme memandang pendidikan sebagai alat integrasi sosial yang menjaga keteraturan melalui transmisi nilai bersama. Teori konflik menyoroti peran pendidikan dalam mereproduksi ketidaksetaraan lewat perbedaan akses dan peluang, namun tetap membuka ruang kritis untuk menantang dominasi. Sementara itu, interaksionisme simbolik menjelaskan bagaimana makna pendidikan terbentuk dari interaksi sehari-hari, simbol, bahasa, serta proses pelabelan yang memengaruhi identitas siswa. Secara keseluruhan, pendidikan perlu dibaca secara multidimensi: sebagai sistem penopang keteraturan, arena pertarungan kepentingan, dan ruang simbolik yang membentuk karakter generasi.

Kata kunci: sosiologi pendidikan, fungsionalisme, teori konflik, interaksionisme simbolik, pendidikan Indonesia

Abstract

Education is not merely a space for transferring knowledge, but a social arena that shapes values, norms, and collective identity. This study uses a sociological perspective on education to examine the dynamics of Indonesian education through three main theories: functionalism, conflict, and symbolic interactionism. The research was conducted using a qualitative approach through a literature review of academic works from 2005–2025. The results of the study indicate that functionalism views education as a tool for social integration that maintains order through the transmission of shared values. Conflict theory highlights the role of education in reproducing inequality through differences in access and opportunity, while still opening up critical space to challenge domination. Meanwhile, symbolic interactionism explains how the meaning of education is formed from everyday interactions, symbols, language, and labeling processes that influence student identity. Overall, education needs to be read multidimensionally: as a system supporting order, an arena for competing interests, and a symbolic space that shapes the character of generations.

Keywords: sociology of education, functionalism, conflict theory, symbolic interactionism, Indonesian education

PENDAHULUAN

Sosiologi pendidikan berkembang sebagai disiplin yang mempelajari hubungan timbal balik antara dinamika masyarakat dan realitas pendidikan. Dalam kajian

kontemporer, pendidikan tidak lagi dipahami hanya sebagai proses linear yang berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi sebagai arena sosial yang berfungsi membentuk struktur berpikir, nilai moral, identitas kelompok, hingga stratifikasi sosial dalam jangka Panjang (Badruddin et al., 2024). Pendidikan merupakan institusi yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Karena itu, setiap praktik pedagogis, kebijakan kurikulum, maupun interaksi di ruang kelas selalu mencerminkan kondisi masyarakat yang melingkupinya (Mubarok, 2025). Perspektif ini memposisikan pendidikan sebagai entitas sosial yang dinamis sering kali stabil, tetapi juga rentan terhadap perubahan struktural.

Sosiologi pendidikan merupakan disiplin yang sangat krusial dalam membedah hubungan timbal balik antara dinamika masyarakat dan realitas pendidikan. Dalam konteks modern, pendidikan bukan lagi sekadar proses transfer pengetahuan yang linear, melainkan arena sosial yang membentuk struktur berpikir, nilai moral, identitas, hingga stratifikasi sosial. Di Indonesia, tantangan pendidikan semakin kompleks seiring dengan adanya disparitas struktural yang nyata. Berdasarkan berbagai kajian, ketimpangan antarwilayah, perbedaan kualitas tenaga pendidik, serta kesenjangan akses infrastruktur digital menjadi isu fundamental yang mencerminkan kondisi masyarakat kita (Muhaemin, 2020). Fenomena ini diperparah oleh munculnya "kelas sosial baru" berbasis akses teknologi di era digital, yang menunjukkan bahwa pendidikan sering kali belum mampu menjadi instrumen mobilitas sosial yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam melalui tiga paradigma besar fungsionalisme struktural, teori konflik, dan interaksionisme simbolik untuk memahami bagaimana institusi pendidikan dapat menjaga stabilitas sekaligus mereproduksi ketimpangan atau membentuk identitas siswa melalui interaksi mikro.

Dalam kajian teoretis, terdapat tiga paradigma besar yang menjadi fondasi analisis sosiologi pendidikan, yaitu fungsionalisme struktural, teori konflik, dan interaksionisme simbolik (Sukmana et al., 2025). Ketiganya memberikan cara pandang berbeda dalam menafsirkan bagaimana pendidikan bekerja dalam masyarakat. Paradigma ini bukan hanya kerangka abstrak, tetapi instrumen analitis yang memungkinkan peneliti memahami bagaimana sistem pendidikan dapat mengokohkan keteraturan, menghasilkan ketimpangan, atau memaknai interaksi simbolik tingkat mikro.

Fungsionalisme struktural, yang akar pemikirannya berasal dari Emile Durkheim dan disistematisasi oleh Talcott Parsons dalam Juwita et al. (2020), menekankan bahwa pendidikan berfungsi menjaga harmoni sosial melalui internalisasi nilai kolektif, penguatan solidaritas, serta pewarisan budaya bersama. Durkheim memandang sekolah sebagai "benteng moralitas sosial" yang menyiapkan individu agar mampu menjalankan peran sosialnya secara efektif (Maunah, 2016). Parsons kemudian menegaskan bahwa pendidikan berperan menyeleksi, memotivasi, dan mengalokasikan individu sesuai kebutuhan sistem sosial melalui mekanisme meritokrasi. Dalam pandangan ini, stabilitas masyarakat menjadi orientasi utama.

Namun, perspektif berbeda ditawarkan oleh teori konflik. Berakar pada gagasan Karl Marx, pendekatan ini melihat pendidikan sebagai sarana strategis untuk mempertahankan dominasi kelompok berkuasa (Nugroho, 2021). Melalui kontrol terhadap kurikulum, kebijakan, dan distribusi sumber daya, kelompok dominan dapat mereproduksi ketimpangan antarkelas secara sistematis (Romli & Nashihin, 2024). Teori ini menyoroti bagaimana institusi pendidikan dapat memperkuat privilege, menormalisasi ketimpangan, dan memperhalus bentuk-bentuk hegemoni melalui mekanisme pengujian, sertifikasi, dan stratifikasi akademik. Dalam konteks modern, teori konflik menekankan bahwa pendidikan

sering kali terjebak dalam logika kapitalisme global kompetisi, komersialisasi, dan diferensiasi kualitas antar lembaga.

Sementara itu, interaksionisme simbolik menawarkan perspektif mikro yang berfokus pada makna dan interpretasi yang terbentuk melalui interaksi sehari-hari (Halik, 2024). Dalam proses belajar-mengajar, bahasa, simbol, gaya komunikasi guru, hingga ekspresi non-verbal memainkan peran penting dalam pembentukan identitas peserta didik (Zanki, 2020). Perspektif ini menegaskan bahwa pengalaman pendidikan bersifat subjektif, diproduksi melalui interaksi, dan dapat menghasilkan label sosial yang mempengaruhi kepercayaan diri, motivasi, serta prestasi akademik jangka panjang.

Ketika ketiga perspektif klasik tersebut diterapkan dalam konteks Indonesia, muncul gambaran komprehensif tentang bagaimana pendidikan beroperasi dalam realitas sosial yang beragam. Hingga kini, paradigma fungsionalisme masih terlihat kuat dalam sistem pendidikan nasional, terutama melalui upaya pemerintah menyusun kurikulum terpadu, pendidikan karakter, serta program penguatan ideologi kebangsaan sebagai bentuk integrasi sosial (Harahap et al., 2024). Namun, di balik fungsi integratif tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan tetap menjadi isu mendasar. Ketimpangan antarwilayah, perbedaan kualitas tenaga pendidik, akses terhadap infrastruktur digital, serta disparitas ekonomi keluarga mencerminkan dinamika konflik struktural yang dijelaskan dalam teori Marxian dalam (Irawati et al., 2024). Ketimpangan ini semakin tampak pada era digital, ketika kemampuan teknologi menjadi faktor baru yang menciptakan kelas-kelas sosial berbasis akses pengetahuan.

Di sisi lain, praktik interaksional di sekolah-sekolah Indonesia menunjukkan bahwa faktor mikro sering kali menimbulkan efek domino dalam pengalaman belajar siswa. Misalnya, pemberian label seperti “siswa berprestasi”, “siswa lambat belajar”, atau “siswa bermasalah” dapat membentuk identitas akademik dan sosial peserta didik (Lili, 2022). Guru yang memandang siswa hanya dari nilai ujian dapat menciptakan ekspektasi yang menghasilkan self-fulfilling prophecy, di mana siswa berperilaku sesuai label yang diberikan (Wahyudin, 2016). Hal ini menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau kebijakan, tetapi juga secara kuat dibentuk oleh interaksi sosial yang berlangsung dari hari ke hari.

Ketika literatur teoretis klasik dan kajian kontemporer digabungkan dengan dinamika pendidikan Indonesia, terlihat bahwa ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan kompleksitas pendidikan. Fungsionalisme memberi kerangka untuk memahami tujuan integratif dan moral pendidikan; teori konflik menyoroti dinamika ketimpangan struktural; sementara interaksionisme simbolik membantu mengungkap bagaimana tindakan kecil dapat memengaruhi pengalaman pendidikan seseorang secara mendalam. Karena itu, kajian sosiologi pendidikan tidak hanya penting untuk memahami fenomena pendidikan, tetapi juga untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap perubahan sosial.

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menganalisis secara kritis penggunaan teori-teori klasik tersebut dalam membedah anatomi pendidikan di Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat akademik berupa kerangka teoretis yang relevan bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan humanis. Secara lebih spesifik, fokus penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah utama, yaitu: bagaimana relevansi teori fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme simbolik dalam memahami dinamika serta tantangan pendidikan di Indonesia pada masa kini?. Melalui pendekatan studi pustaka terhadap karya akademik tahun 2005–2025, penelitian ini berupaya memetakan bagaimana pendidikan berfungsi sebagai alat integrasi nasional (fungsionalisme), arena kontestasi kepentingan (konflik), dan ruang konstruksi makna (interaksionisme).

Dengan merinci aspek-aspek tersebut, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi landasan bagi para pendidik dan pembuat kebijakan untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi di era globalisasi.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk mengeksplorasi fenomena sosiologi pendidikan melalui interpretasi teks dan konteks yang tersedia dalam literatur akademik. Fokus utama analisis diarahkan pada tiga paradigma besar sosiologi klasik, yaitu fungsionalisme struktural, teori konflik, dan interaksionisme simbolik, guna mengungkap relevansinya terhadap dinamika pendidikan kontemporer di Indonesia. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan sintesis mendalam terhadap berbagai pemikiran teoretis dan hasil penelitian terdahulu tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung.

Pemilihan sumber literatur dalam kajian ini didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat untuk menjamin validitas hasil analisis. Kriteria inklusi meliputi karya ilmiah berupa buku teks sosiologi klasik (seperti karya Durkheim, Marx, dan Mead) serta artikel jurnal akademik nasional maupun internasional yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2005 hingga 2025. Literatur yang dipilih harus memiliki fokus spesifik pada sosiologi pendidikan atau aplikasi teori sosiologi dalam ranah instruksional dan institusi pendidikan. Sebaliknya, kriteria eksklusi diterapkan pada literatur yang diterbitkan di luar rentang waktu tersebut kecuali untuk sumber primer teori klasik serta karya tulis yang tidak melalui proses *peer-review* atau tidak memiliki relevansi langsung dengan konteks pendidikan di Indonesia.

Prosedur analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sistematis dimulai dari pengumpulan literatur yang relevan, diikuti dengan reduksi dan klasifikasi data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Pada tahap ini, peneliti membaca, mengklasifikasikan, serta menghubungkan proposisi teoretis dengan fakta empiris di lapangan pendidikan Indonesia, seperti kebijakan kurikulum, ketimpangan akses digital, dan interaksi sosial di sekolah. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan secara kritis dengan membandingkan kerangka teoretis yang ada dengan realitas sosiologis saat ini, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi ketiga teori tersebut sebagai pisau analisis dalam sosiologi pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan sebagai Instrumen Keteraturan Sosial dalam Perspektif Teori Fungsionalisme

Teori fungsionalisme merupakan salah satu paradigma utama dalam sosiologi klasik yang menekankan pentingnya keteraturan sosial dan stabilitas masyarakat. Dalam kerangka ini, pendidikan dilihat sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi menjaga kesinambungan sistem sosial dengan cara menanamkan nilai, norma, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Emile Durkheim, sebagai salah satu tokoh utama fungsionalisme, menegaskan bahwa pendidikan merupakan “alat moral” yang menyiapkan individu agar mampu berintegrasi ke dalam kehidupan sosial. Sekolah bukan hanya tempat transfer pengetahuan, melainkan ruang sosialisasi di mana anak belajar disiplin, solidaritas, dan penghargaan terhadap aturan kolektif (Durkheim, 1956).

Durkheim memandang pendidikan sebagai perpanjangan dari masyarakat. Ia menyatakan bahwa tanpa proses pendidikan, masyarakat tidak dapat mempertahankan kohesi sosialnya. Melalui kurikulum, kegiatan sekolah, dan hubungan antara guru dan murid, terjadi internalisasi nilai-nilai yang memungkinkan keteraturan terjaga. Parsons, sosiolog fungsionalis lainnya,

menambahkan bahwa pendidikan memiliki peran sebagai mekanisme seleksi dan distribusi sosial. Sekolah menjadi arena di mana individu dipilah berdasarkan prestasi, sehingga setiap orang menempati posisi yang sesuai dalam struktur Masyarakat (Ritzer & Stepnisky, 2017).

Relevansi teori fungsionalisme dalam pendidikan Indonesia semakin terlihat ketika dikaitkan dengan temuan Yasin & Adawiyah (2022), yang menunjukkan bahwa guru memiliki nilai sosial yang tinggi dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Temuan ini menguatkan pandangan Durkheim bahwa pendidikan, melalui figur guru, berfungsi menjaga kohesi sosial dan memperkuat solidaritas kolektif. Lebih jauh, Yasin menegaskan bahwa interaksi harmonis masyarakat Gang Kauman I terbentuk karena adanya toleransi dan kebersamaan yang telah menjadi norma bersama. Perspektif ini sejalan dengan praktik pendidikan Indonesia yang menempatkan guru sebagai agen moral sekaligus perekat sosial. Dalam penelitian lain, Yasin, Rosaliana, dan Habibah menekankan peran guru sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat, yang memperlihatkan bahwa institusi pendidikan berperan penting dalam menjaga kesinambungan nilai sosial di luar ruang kelas (Yasin et al., 2023).

Jika dilihat dari realitas lapangan, pendidikan di Indonesia sangat erat dengan kerangka fungsionalisme. Kurikulum Merdeka dengan konsep Profil Pelajar Pancasila menjadi contoh nyata bagaimana negara menggunakan pendidikan sebagai instrumen pembentukan keteraturan sosial. Nilai gotong royong, integritas, kebinekaan global, dan kemandirian adalah bentuk konkret dari nilai kolektif yang ditanamkan melalui pendidikan formal.

Mardizal dan kolega menekankan bahwa pendidikan di Indonesia selalu memiliki peran ganda: sebagai sarana peningkatan kompetensi akademik sekaligus media pembentukan karakter bangsa. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah bukan hanya diarahkan pada pengembangan bakat, tetapi juga penanaman nilai solidaritas, kerja sama, dan kepemimpinan. Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi sebagai “laboratorium sosial” yang mempersiapkan generasi muda agar mampu hidup dalam tatanan masyarakat yang kompleks (Mardizal & Ramatni, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa teori fungsionalisme masih sangat relevan dalam membaca peran pendidikan di Indonesia. Pendidikan berfungsi sebagai agen sosialisasi, mekanisme integrasi sosial, dan sarana pengendalian sosial. Fungsi ini tidak hanya berlaku pada masa Durkheim, tetapi juga terus berlanjut hingga konteks modern. Namun, relevansi teori fungsionalisme harus dibaca secara kritis. Pertama, meskipun pendidikan mampu menjaga keteraturan sosial, ia juga berpotensi melanggengkan ketimpangan jika hanya menekankan kepatuhan tanpa membuka ruang kritis. Hal ini sejalan dengan kritik dari teori konflik yang melihat pendidikan sebagai arena reproduksi dominasi kelas. Kedua, dalam era globalisasi, tantangan bagi pendidikan bukan hanya menjaga keteraturan, tetapi juga menghadapi disrupsi nilai akibat teknologi dan budaya global. Fungsionalisme cenderung menekankan stabilitas, padahal realitas pendidikan saat ini justru penuh dengan dinamika perubahan. Kendati demikian, teori fungsionalisme tetap memberikan dasar yang kokoh untuk memahami peran pendidikan sebagai penjamin keteraturan sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Ritzer & Stepnisky (2017) serta (Joyce & Calhoun, 2024), meskipun paradigma fungsionalisme sering dianggap konservatif, ia tetap menjadi referensi penting dalam memahami bagaimana masyarakat mempertahankan stabilitas melalui institusi pendidikan. Dengan demikian, fungsionalisme masih relevan, meski perlu dilengkapi dengan perspektif lain seperti teori konflik dan interaksionisme untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Berlawanan dengan fungsionalisme, teori konflik melihat pendidikan sebagai instrumen kelompok dominan untuk mempertahankan privilese. Melalui mekanisme seperti komersialisasi sekolah unggulan dan kebijakan zonasi yang sering kali

dimanipulasi, pendidikan justru memperlebar jurang antara kelas kaya dan miskin. Ketimpangan ini semakin nyata dalam fenomena kesenjangan digital (*digital divide*), di mana sekolah dengan sumber daya melimpah mampu beradaptasi lebih cepat, sementara sekolah di wilayah terpencil semakin tertinggal.

Kritik terhadap teori konflik adalah kecenderungannya yang terlalu deterministik melihat siswa hanya sebagai korban pasif struktur. Padahal, pendidikan juga bisa menjadi alat emansipasi. Di Indonesia, meskipun akses pendidikan masih timpang, munculnya gerakan pendidikan alternatif dan beasiswa bagi masyarakat berpenghasilan rendah menunjukkan bahwa arena konflik ini tetap membuka peluang bagi mobilitas vertikal. Refleksi Konten Indonesia: Teori konflik menjadi pisau bedah yang tajam untuk mengkritisi kebijakan Merdeka Belajar agar tidak terjebak pada bias struktural yang hanya menguntungkan sekolah-sekolah di perkotaan. Tanpa intervensi kebijakan afirmatif, pendidikan di Indonesia akan terus menjadi mesin reproduksi ketidakadilan ekonomi.

Pada level mikro, interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa realitas pendidikan dibentuk melalui bahasa, simbol, dan interaksi harian. Proses labeling oleh guru, seperti menyebut siswa "pintar" atau "bermasalah", secara mendalam memengaruhi identitas akademik dan motivasi siswa melalui mekanisme *self-fulfilling prophecy*. Dalam konteks Indonesia, simbol religius dan ritual seperti upacara bendera bukan sekadar rutinitas, melainkan media konstruksi identitas sosial keagamaan dan kebangsaan (Arifin et al., 2024). Dalam era pembelajaran daring, teori ini sangat relevan untuk menganalisis bagaimana "kehadiran sosial" dikonstruksi melalui layar. Tantangannya adalah hilangnya gestur non-verbal dan simbol fisik kelas, yang dapat menyebabkan distorsi makna dalam interaksi guru-siswa. Penggunaan emoji, gaya bahasa di ruang obrolan, dan pemilihan latar belakang video menjadi simbol baru dalam manajemen kesan (*impression management*) siswa dan guru di panggung teater digital. Interaksionisme simbolik mengingatkan kita bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemegahan infrastruktur, tetapi oleh kehangatan hubungan mikro. Di tengah digitalisasi, tantangan terbesarnya adalah menjaga agar teknologi tidak mereduksi manusia menjadi sekadar data, melainkan tetap menjadi subjek yang saling memberi makna.

Pendidikan sebagai Arena Reproduksi Ketimpangan Sosial

Teori konflik dalam sosiologi pendidikan berakar pada pemikiran Karl Marx yang menekankan bahwa struktur sosial selalu ditandai oleh pertentangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dengan kelompok yang tertindas. Dalam perspektif ini, pendidikan tidak dipandang netral, melainkan sebagai instrumen yang digunakan kelompok dominan untuk mempertahankan kepentingannya. Pendidikan dianggap mereproduksi ketidaksetaraan dengan cara melanggengkan stratifikasi sosial yang sudah ada (Ritzer & Stepnisky, 2017). Hal ini berbeda dengan teori fungsionalisme yang melihat pendidikan sebagai mekanisme integrasi sosial. Teori konflik justru menyoroti ketidakmerataan kesempatan pendidikan yang cenderung berpihak pada kelompok tertentu, terutama yang memiliki modal ekonomi, politik, maupun budaya.

Pandangan ini juga diperkuat oleh Joyce & Calhoun (2024) yang menjelaskan bahwa pendidikan tidak pernah terlepas dari relasi kekuasaan. Kurikulum, metode pembelajaran, bahkan standar evaluasi bukan hanya produk akademik, tetapi juga hasil dari negosiasi politik antara aktor-aktor dominan. Dalam konteks Indonesia, misalnya, perubahan kurikulum tidak hanya mencerminkan kebutuhan pedagogis, tetapi juga arah kebijakan politik yang menginginkan pendidikan sesuai dengan ideologi negara. Dengan demikian, teori konflik mengajak kita melihat pendidikan bukan sekadar ruang belajar, melainkan arena kontestasi kepentingan sosial dan politik.

Temuan Yasin & Adawiyah (2022) mengenai adanya perbedaan karakter dan stereotip dalam masyarakat menunjukkan bentuk labeling sosial yang secara tidak langsung mereproduksi ketimpangan. Fenomena ini dapat dibaca melalui perspektif teori konflik, di mana perbedaan sosial yang tampak sederhana sekalipun dapat memperkuat dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain. Label yang dilekatkan masyarakat terhadap individu menjadi bentuk ketidaksetaraan simbolik yang relevan dengan analisis Marxian mengenai relasi kuasa. Ketika labeling ini terjadi dalam konteks pendidikan, ia berpotensi menciptakan bias perlakuan, akses, dan kesempatan belajar bagi siswa sebuah cermin nyata dari reproduksi ketimpangan kultural.

Analisis Yasin dan Jumarni tentang kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Gang Barokah menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara kelompok dengan akses pendidikan yang memadai dan kelompok yang berada pada posisi ekonomi lebih rendah. Ketimpangan tersebut tidak hanya memengaruhi kualitas hidup, tetapi juga menciptakan siklus sosial yang berulang, di mana individu dari keluarga berpendapatan rendah cenderung memiliki peluang pendidikan yang terbatas. Temuan ini selaras dengan perspektif teori konflik, yang memandang bahwa pendidikan sering kali menjadi arena reproduksi ketidaksetaraan, bukan semata ruang mobilitas sosial. Dalam konteks masyarakat Gang Barokah, struktur sosial ekonomi yang timpang membuat pendidikan berfungsi sebagai alat seleksi sosial yang mempertahankan dominasi kelompok yang memiliki modal ekonomi dan kultural lebih kuat. Dengan demikian, penelitian Yasin & Jumarni (2022) memberikan bukti empiris bahwa ketimpangan struktural di tingkat lokal dapat memperkuat relasi kuasa dalam masyarakat melalui mekanisme pendidikan.

Fenomena zonasi sekolah menjadi contoh konkret bagaimana teori konflik bekerja dalam pendidikan. Kebijakan yang dimaksudkan untuk pemerataan justru memunculkan strategi manipulatif dari kelompok ekonomi menengah, seperti pindah alamat demi masuk sekolah favorit bukti bahwa kelompok dominan tetap mempertahankan privilese mereka.

Sarifudin et al., (2023) menemukan bahwa ketimpangan partisipasi masyarakat dalam program pendidikan di Makassar berakar pada ketidaksetaraan akses dan informasi. Dari perspektif konflik, ini bukan masalah kemauan individu, tetapi struktur sosial yang timpang. Kesenjangan digital (*digital divide*) semakin menegaskan relevansi analisis konflik. Sekolah di wilayah terpencil tertinggal dalam pemanfaatan teknologi. Awwaliyah & Arifin (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan justru memperlebar jarak antara sekolah kaya dan miskin jika tidak disertai kebijakan afirmatif.

Gagasan klasik seperti Ritzer & Stepnisky (2017) menggambarkan pendidikan sebagai arena reproduksi ketidaksetaraan. Realitas Indonesia memperlihatkan hal serupa, di mana kebijakan pemerataan sering menimbulkan bentuk ketidakadilan baru. Perbedaan ideologi dalam pendidikan umum dan pendidikan agama sebagaimana ditunjukkan Romli & Nashihin (2024) semakin menguatkan argumen Sadovnik bahwa pendidikan adalah sarana reproduksi ideologi kelompok dominan. Dari perspektif teori konflik, pendidikan di Indonesia masih jauh dari ideal sebagai sarana mobilitas sosial. Sebaliknya, pendidikan justru mempertegas jurang antara kelompok sosial. Kesenjangan antara kota dan desa, sekolah negeri dan swasta, serta sekolah umum dan pesantren memperlihatkan bagaimana distribusi sumber daya tidak seimbang.

Kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan pemerintah memiliki potensi besar, tetapi implementasinya memperlihatkan bias struktural (Mubarok et al., 2023). Sekolah dengan sumber daya memadai mampu beradaptasi lebih cepat, sementara sekolah miskin tertinggal. Hal ini memperlihatkan bagaimana kebijakan pendidikan sering kali hanya menguntungkan kelompok dominan.

Teori konflik memberikan lensa kritis untuk memahami realitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan bukanlah ruang netral, tetapi arena pertarungan kepentingan antara kelas sosial, ideologi, dan distribusi kekuasaan. Ketidaksetaraan akses, kesenjangan digital, hingga pertarungan ideologi di sekolah menjadi bukti nyata bahwa teori konflik tetap relevan untuk membaca dinamika pendidikan kontemporer.

Pendidikan sebagai Arena Reproduksi Ketidaksetaraan

Interaksionisme simbolik merupakan salah satu teori sosiologi klasik yang menekankan pentingnya simbol, bahasa, dan interaksi dalam membentuk realitas sosial. Dalam perspektif ini, manusia dipandang sebagai aktor yang aktif menafsirkan makna dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi dengan orang lain. Pendidikan, sebagai sebuah institusi sosial, dipandang tidak hanya sebagai ruang transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai arena pembentukan makna melalui simbol, ritual, dan komunikasi antarindividu. Mead, Blumer, hingga Goffman menjadi tokoh utama yang banyak memberi fondasi bagi teori ini. Mead menekankan konsep *self* yang terbentuk melalui interaksi simbolik, Blumer mempopulerkan istilah interaksionisme simbolik, sedangkan Goffman mengembangkan perspektif dramaturgi yang menggambarkan interaksi sosial layaknya sebuah panggung teater (Joyce & Calhoun, 2024).

Dalam dunia pendidikan, teori interaksionisme simbolik memberikan lensa mikro untuk memahami bagaimana proses belajar sebenarnya berlangsung di ruang kelas dan di lingkungan sekolah. Teori ini meyakini bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka konstruksi melalui interaksi sosial, dan makna tersebut diperoleh dari simbol-simbol yang beredar di lingkungan mereka. Pendidikan, dalam perspektif ini, bukan hanya arena penyampaian materi, tetapi ruang produksi makna yang melibatkan bahasa, gestur, ritual, dan representasi sosial lainnya. Halik menegaskan bahwa pendidikan merupakan arena simbolik yang sarat makna, di mana komunikasi, seremonial, serta praktik pedagogis membentuk pemahaman siswa terhadap dunia sosialnya (Halik, 2024).

Proses belajar tidak dapat dipahami hanya dari kurikulum tertulis, karena siswa sebenarnya membangun makna melalui interaksi dengan guru, teman sebaya, dan simbol-simbol visual di sekolah. Zanki (2021) menekankan bahwa praktik pendidikan sangat dipengaruhi oleh simbolisasi, termasuk bahasa, tanda, rutinitas, serta interaksi nonverbal. Dalam kerangka ini, upacara bendera misalnya, tidak hanya dipahami sebagai kegiatan rutin mingguan, tetapi ritual simbolik yang memproduksi makna kebangsaan, disiplin, loyalitas, dan solidaritas di antara siswa. Di sekolah-sekolah berbasis Islam, simbol-simbol seperti salam, doa bersama, seragam religius, dan ritual keagamaan lainnya memiliki peran penting dalam membentuk identitas sosial keagamaan siswa. Ulwiyah et al. (2021) menjelaskan bahwa simbol-simbol religius berfungsi sebagai bagian dari sistem sosial pendidikan yang menginternalisasikan nilai-nilai tertentu dalam diri siswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Rafi et al. (2024) menunjukkan bahwa interaksi sosial antara guru dan siswa memiliki pengaruh langsung terhadap motivasi belajar siswa di SMK Nurul Hikmah Sangatta. Interaksi yang ditandai dengan komunikasi yang suportif, pemberian umpan balik positif, serta penghargaan terhadap usaha siswa terbukti mampu membangun rasa percaya diri dan meningkatkan antusiasme belajar. Temuan ini sejalan dengan perspektif interaksionisme simbolik yang menekankan bahwa makna dan perilaku individu dibentuk melalui proses interaksi sehari-hari. Dalam konteks ini, sikap guru, ekspresi verbal maupun nonverbal, dan cara guru memberi penilaian menjadi simbol sosial yang diinterpretasikan siswa sebagai bentuk penerimaan atau penolakan. Ketika simbol-simbol tersebut dipersepsi positif, maka motivasi belajar meningkat, sebaliknya ketika interaksi bersifat negatif dapat menurunkan semangat belajar. Dengan demikian, penelitian

ini memberikan bukti empiris bahwa kualitas hubungan mikro antara guru dan siswa memainkan peran penting dalam pembentukan motivasi belajar, sekaligus mendukung gagasan bahwa identitas akademik siswa terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berkelanjutan.

Interaksi guru-siswa merupakan pusat kajian interaksionisme simbolik dalam pendidikan. Komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan makna dan membangun relasi sosial. Lili (2022) menunjukkan bagaimana guru menggunakan bahasa religius, humor, sapaan emosional, dan gerakan tubuh untuk membangun kedekatan simbolik dengan santri. Interaksi semacam ini memperkuat otoritas guru, menciptakan kenyamanan belajar, serta membentuk identitas sosial peserta didik.

Proses labeling di sekolah juga menjadi perhatian teori ini. Guru sering kali, meskipun tidak disadari, memberikan label seperti “pintar”, “malas”, atau “nakal” kepada siswa. Label tersebut dapat menjadi bagian dari identitas sosial siswa yang memengaruhi perilaku, motivasi, dan bagaimana mereka diperlakukan oleh lingkungan sekitarnya. (Mubarok, 2022) Ballantine dan Hammack menjelaskan bahwa labelisasi ini menjadi bagian dari hidden curriculum, yaitu kurikulum tersembunyi yang membentuk identitas siswa di luar kurikulum resmi.

Simbol-simbol visual seperti seragam, lambang sekolah, tata tertib, serta desain ruang kelas juga memiliki fungsi simbolik dalam membangun identitas kolektif. Halik mencatat bahwa simbol-simbol tersebut merupakan bahasa nonverbal yang membantu membangun konsensus makna di lingkungan sekolah (Halik, 2024). Misalnya, perbedaan seragam antara sekolah umum dan madrasah tidak hanya mencerminkan perbedaan institusional, tetapi juga membawa makna ideologis dan kultural yang membentuk identitas siswa.

Dari perspektif pendidikan Islam, simbol religius berfungsi ganda: sebagai media pembentukan spiritualitas sekaligus sebagai identitas sosial kolektif. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak sekadar mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengonstruksi realitas sosial melalui simbol-simbol religius yang dipraktikkan dalam kehidupan sekolah.

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa interaksionisme simbolik memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika mikro dalam pendidikan, yang kerap kali luput dari analisis struktural makro. Perspektif ini melengkapi fungsionalisme dan teori konflik dengan menekankan dimensi interaksi sehari-hari yang membentuk realitas pendidikan.

PENUTUP

Simpulan

Kajian pustaka ini menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia merupakan sebuah ekosistem multidimensional yang bekerja secara simultan sebagai penjamin stabilitas (fungsionalisme), arena kontestasi kepentingan (konflik), dan ruang konstruksi makna (interaksionisme). Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun kebijakan nasional seperti Kurikulum Merdeka berupaya menciptakan integrasi nilai melalui Profil Pelajar Pancasila, terdapat risiko reproduksi ketimpangan yang laten akibat disparitas akses digital dan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi. Analisis ini membuktikan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada soliditas struktur makro, tetapi juga pada dinamika interaksi mikro di kelas, di mana proses pelabelan dan pertukaran simbol antara guru dan siswa menjadi penentu utama pembentukan identitas serta motivasi belajar generasi muda.

Secara praktis, temuan ini membawa implikasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pembuat kebijakan, diperlukan pendekatan yang lebih afirmatif untuk memitigasi dampak teori konflik, yakni dengan memastikan bahwa standarisasi pendidikan tidak mengabaikan keragaman konteks lokal dan ekonomi.

Bagi para pendidik, kesadaran akan interaksionisme simbolik sangat krusial agar mereka lebih berhati-hati dalam memberikan label kepada siswa, terutama dalam lingkungan pembelajaran daring yang rentan akan distorsi makna. Sementara bagi peneliti, kajian ini menjadi landasan teoretis untuk melihat pendidikan bukan sebagai entitas statis, melainkan sebagai proses negosiasi terus-menerus antara keteraturan, kekuasaan, dan pemaknaan individu.

Saran

Penguatan kebijakan berbasis keadilan sosial menjadi urgensi utama untuk memastikan akses, kualitas, dan fasilitas pendidikan yang merata di seluruh Indonesia, terlebih karena disparitas pendidikan masih selaras dengan kritik teori konflik mengenai ketimpangan struktural. Di sisi lain, lembaga pendidikan perlu melakukan internalisasi nilai dan norma secara kontekstual agar fungsi pendidikan tidak hanya menjaga keteraturan sosial, seperti pendekatan fungsionalisme, tetapi juga mendorong inklusivitas, penghargaan terhadap keberagaman, dan penerimaan antarindividu. Praktik pedagogis pun memerlukan pembaruan: guru diharapkan menghindari labeling yang bisa menjatuhkan mental siswa dan sebaliknya membangun interaksi positif yang mendukung perkembangan identitas diri mereka, sebagaimana ditekankan oleh interaksionisme simbolik. Selain itu, integrasi literasi sosial dalam kurikulum menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan pemahaman siswa mengenai struktur sosial, dinamika kekuasaan, dan tanggung jawab moral sebagai warga masyarakat. Untuk memperkuat seluruh upaya tersebut, riset lanjutan berbasis multidisiplin sangat penting dilakukan dengan mengombinasikan tiga teori utama ini bersama pendekatan kontemporer seperti analisis kebijakan, etnografi sekolah, hingga pemanfaatan big data agar menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif terhadap tantangan pendidikan di era digital yang terus bergerak cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, P. P., Mubarak, R., & Syafi'i, M. I. (2024). Transformasi Budaya Religius: Strategi Implementasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Islam DDI Sangatta Utara. *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 96–120. <https://doi.org/10.69900/ag.v4i2.209>
- Awwaliyah, I., & Arifin, Z. (2025). Teori-Teori (Model Analisis) Sosiologi Dalam Mempelajari Pendidikan. *MHS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Keislaman*, 1(2), 142–152.
- Badrudin, S., Halim, P., Wulandari, F. T., & IP, S. (2024). *Pengantar sosiologi*. Zahir Publishing.
- Durkheim, É. (1956). *Education and Sociology*. Free Press. <https://books.google.co.id/books?id=HcG3zQEACAAJ>
- Halik, H. (2024). Pendidikan sebagai Arena Simbolik: Telaah Konseptual Interaksionisme Simbolik George H. Mead. *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah*, 3(1), 27–41.
- Harahap, N. I. Y., Hanani, S., Iqbal, M., & Pratama, A. R. (2024). Peran pendidikan Islam dalam mempertahankan integrasi sosial: Pandangan Emile Durkheim dalam sosiologi pendidikan. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(1), 1–11.
- Irawati, D., Azizah, N., Januar, J., & Kamal, M. (2024). Relevansi Pemikiran Tokoh Sosiologi Klasik Dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan Islam. *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 462–471.
- Joyce, B., & Calhoun, E. (2024). *Models of Teaching*. Routledge.

- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., & Aliman, M. (2020). Meta Analisis: Perkembangan teori struktural fungsional dalam sosiologi pendidikan. *Jurnal Perspektif*, 3(1), 1–8.
- Lili, L. (2022). *Komunikasi Interpersonal Guru dan Santri TPQ As Syafiiyah (Analisis Teori Interaksionisme Simbolik G. Herbert Mead)*. UIN. Prof. KH Saifuddin Zuhri.
- Mardizal, J., & Ramatni, A. (2024). *Sosiologi Pendidikan*. Jonni Mardizal.
- Maunah, B. (2016). Pendidikan dalam perspektif struktural fungsional. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 10(2), 159–178.
- Mubarok, R. (2022). Management of Material Component Development in Multicultural Islamic Education Curriculum. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6(2), 249–266. <https://doi.org/10.21009/hayula.006.02.06>
- Mubarok, R. (2025). *Multikulturalisme & Moderasi Beragama: Teori dan Praktik dalam Pendidikan Agama Islam*. Literasi Nusantara. [https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/694/1/MULTIKULTURALISME & MODERASI BERAGAMA.pdf](https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/694/1/MULTIKULTURALISME_%20MODERASI_BERAGAMA.pdf)
- Mubarok, R., Sholeh, M., & Irayana, I. (2023). Classroom Management Strategy in Implementing the Merdeka Curriculum (Independent Curriculum) in Primary Education Institutions. *Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 13(2), 189–202. <https://doi.org/10.18592/aladzkapgmi.v13i2.11356>
- Muhaemin, R. M. (2020). Upgrade Kompetensi Guru PAI Dalam Merespon Pembelajaran Jarak Jauh Dimasa Pandemi Covid-19. *AL-FIKR: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 75–82.
- Nugroho, A. C. (2021). Teori utama sosiologi komunikasi (fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(2).
- Rafi, K., Hikmah, N., & Yasin, M. (2024). Peran Interaksi Sosial Guru Dalam Membangun Motivasi Belajar Siswa Di Smki Nurul Hikmah Sangatta. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 7(4).
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2017). *Sociological theory*. Sage publications.
- Romli, A., & Nashihin, M. (2024). Urgensi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 11–26.
- Sarifudin, A., Hude, D., & Sarnoto, A. Z. (2023). Metode Kolaborasi dalam Supervisi Pendidikan Berbasis Al-Qur'an. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(02).
- Sukmana, O., Damanik, F. H. S., Randi, R., Nur, A. M., Rahmawati, T., Daulay, P., Supriyatno, T., & Helweldery, R. (2025). *Teori-Teori Sosiologi*. Star Digital Publishing.
- Ulwiyah, N., Maunah, B., & Arifin, Z. (2021). Dimensi Kepemimpinan Transformasional dalam Perspektif al-Qur'an. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 7(2), 157–191.
- Wahyudin, W. (2016). Kepemimpinan Perguruan Dalam Perspektif Teori Interaksionisme Simbolik Dan Dramaturgi. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 14(2), 149–171.
- Yasin, M., & Adawiyah, A. (2022). Pengelolaan Interaksi Sosial Guru Pada Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 4(3), 141–150.
- Yasin, M., & Jumarni, J. (2022). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat

- Pendidikan Masyarakat Gang Barokah Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 2(1), 37–48.
- Yasin, M., Rosaliana, R., & Habibah, S. R. N. (2023). Peran Guru di Sekolah dan Masyarakat. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 382–389.
- Zanki, H. A. (2020). Teori Psikologi Dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi Simbolik). *Scolae: Journal of Pedagogy*, 3(2). <https://doi.org/10.56488/scolae.v3i2.82>
- Zanki, H. A. (2021). *Penanaman Religious Culture (Budaya Religius) di Lingkungan Madrasah*. Penerbit Adab.